DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Alfiah, Ratna Nurul, 2001, *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.

Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press.

Amirin, Tatang M, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian Edisi Cetakan ke-3*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.

_____, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Depok: Rajawali Press.

Djaja, Ermansyah, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fahrojih, Ikhwan, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press.

Friedman, Lawrence M. 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusamedia.

Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta.

_____, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

J. Moleong, Lexy, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Marpaung, Ledeng, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita.

Makarao, Muhammad Taufik dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Mulyadi, Lilik, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung: PT Alumni.

Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.

Prinst, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan.

_____, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Poernomo, Bambang, 1985, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku.

Sutarto, Suryono, 1987, *Sari Hukum Acara Pidana I*, Semarang: Yayasan Cendikia Purna Dharma.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 876);

Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 270);

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 204);

Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung RI, KPK RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Mahkamah Agung RI Dan Menteri Keuangan RI No: 2 Tahun 2011, No: KEP/259/A/JA/12/2011, No:KEPB-01/01-55/11/2011, No: M.HH-10.HM.03.02 Tahun 2011, No :199/KMA/SKB/XI tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 160).

Wawancara:

Ahmad Faisal S.H, Satgas Unit Kerja Labuksi KPK, Wawancara Pribadi Penulis pada Tanggal 20 Febuari 2020.

Budi Priyanto Bc.I.P., S.Pd., M.Si, Kepala Sub Direktorat Administrasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Wawancara Pribadi Penulis pada Tanggal 23 Maret 2020.

Jurnal:

Ukkap Marolon Aruan, April 2014, "*Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP",* Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat Manado, Vol.III, No. 2.

Lutfil Ansori, Desember 2017, *"Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif"*, Jurnal Yuridis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Vol. 4 No. 2.

Giant K.Y. Sepang, Oktober 2015, *"Pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP"*, Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat Manado, Vol. IV No. 8.

Sigit Setyadi, 2016, "*Peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam Penegakan Hukum*", Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, Vol. 1 No. 2.

Tim Pengkajian Hukum Febrian dkk, 2013, *Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta*.

Internet:

Eva Mazrieva, 31 Januari 2019, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Bukti Keseriusan Pemberantasan* Korupsi?, https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-bukti-keseriusan-pemberantasan-korupsi-/4764712.html. Diakses Tanggal 21 September 2019 pada pukul 12.51 WIB.

Sovia Hasanah, 9 Mei 2017, *Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara, Diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 19.22 WIB.

Tim Redaksi Sistem Data Pemasyarakatan, Desember 2019, *Data Terakhir Rupbasan Perkanwil* , http://smslap.ditjenpas.go.id/public/rbs/current/monthly. Diakses pada tanggal 13 November 2019 pada pukul 14.41 WIB.

Tim Redaksi ICJR, 18 April 2016, *ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaaan*, https://icjr.or.id/icjr-dorong-reformasi-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-rupbasan-dan-eksekusi-barang-sitaan/. Diakses pada tanggal 13 November 2019 pada pukul 14.08 WIB.

Resa Esnir, 14 Desember 2016, *Dilema Perawatan Kendaraan Mewah Sitaan KPK*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585149255a1c5/dilema perawatan-kendaraan-mewah-sitaan-kpk. Diakses pada tanggal 29 November 2019 pada pukul 11.45 WIB.

Budi Raharjo, 21 Oktober 2019, *KPK Sita Dokumen Proyek dan Mobil*, https://nasional.republika.co.id/berita/pzp9uy415/kpk-sita-dokumen-

proyek-dan-mobil. Diakses pada tanggal 17 Desember pada pukul 22.10 WIB.

Dylan Aprialdo Rachman dan Tri Purna Jaya, 7 Oktober 2019, *Fakta Terkini OTT Bupati Lampung Utara, Rp 600 Juta Diamankan hingga Jadi Tontonan Warga*, https://regional.kompas.com/read/2019/10/07/12230021/fakta-terkini-ott-bupati-lampung-utara-rp-600-juta-diamankan-hingga-jadi?page=all. Diakses pada tanggal 17 Desember pada pukul 22.25 WIB.

Dery Ridwansyah, 9 Agustus 2019, *Pasca OTT, KPK Sita Mobil Mercy Milik Orang Dekat Politikus PDIP*, https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/08/2019/pasca-ott-kpk-sita-mobil-mercy-milik-orang-dekat-politikus-pdip/. Diakses pada tanggal 17 Desember pada pukul 22.37 WIB.

Fana Suparman, 6 Juli 2019, *KPK Kembali Sita Aset Bupati Mojokerto*, https://www.beritasatu.com/nasional/562933/kpk-kembali-sita-aset-bupati-mojokerto. Diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pada pukul 22.19 WIB.

Devita Retno, 10 Juni 2019, *Sejarah Terbentuknya KPK*, https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-kpk. Diakses pada tanggal 22 Januari 2020 pukul 17.39 WIB.

Nov/Ycb, 3 Juli 2018, *Barang Sitaan Numpuk, Ongkos Perawatan Minim*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19627/barang-sitaan-numpuk-ongkos-perawatan-minim/. Diakses pada tanggal 24 Januari 2020, pukul 17.07 WIB.

Edy Susanto, 4 Juni 2016, *Melongok Nasib Barang Sitaan Negara*, http://www.gresnews.com/berita/esai_foto/107222-melongok-nasib-barang-sitaan-negara/. Diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 17.25 WIB.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Disampaikan pada Rapat Koordinasi KPK tentang Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dalam Rangka Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi), 21-23 November 2016, *Kebijakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Dalam Perspektif Pemulihan Aset*, https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/06-kebijakan-sitaan-barang-rampasan-dirjen-pemasyarakatan-kemenkumham-ri.pdf https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/06-kebijakan-sitaan-barang-rampasan-dirjen-pemasyarakatan-kemenkumham-ri.pdf, hal. 4. Diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pada pukul 15.29 WIB.

Abba Gabrillin, 28 Mei 2018, *KPK Bekali Kejati se-Indonesia soal Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan*, https://nasional.kompas.com/read/2018/05/28/11571851/kpk-bekali-kejati-se-indonesia-soal-pengelolaan-barang-bukti-dan-barang. Diakses pada tanggal 7 April 2020 pada pukul 13.09 WIB.

Shintaloka Pradita Sisca, 14 Maret 2018, *Kemenkeu, Kejaksaan dan KPK Teken MoU Soal Sistem Lelang Nasional*, https://tirto.id/kemenkeu-kejaksaan-dan-kpk-teken-mou-soal-sistem-lelang-nasional-cGab. Diakses pada tanggal 13 April 2020 pada pukul 14.27 WIB.